

PEMBINAAN PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY*
(Program Pelatihan Usaha Tenun Pada Masyarakat
Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis)

Oleh: Hasbullah
Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau
Email: melayu77@gmail.com

Abstrak:

Program pelatihan kecakapan hidup (*life skill*) merupakan program yang penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui program pelatihan kecakapan hidup, masyarakat dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan, keahlian, minat, dan budaya masyarakat setempat. Pelatihan usaha tenun di Desa Bukit Batu merupakan upaya untuk melestarikan kerajinan tradisional khas Melayu Riau yang sudah tidak begitu banyak ditekuni. Oleh karena itu, program pelatihan ini memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga melestarikan kerajinan tradisional masyarakat Melayu Riau. Program ini amat penting dalam upaya mewujudkan Visi Riau 2020 yang ingin menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu pada tahun 2020.

Key Words: Pelatihan, Tenun, dan Perempuan

Pendahuluan

Visi Riau tentang program pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I) perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, agar pada masa mendatang persoalan klasik tersebut tidak lagi menyelimuti Provinsi Riau yang kaya raya dengan sumber daya alam. Program yang baik ini tanpa dukungan dan wujud nyata di tengah masyarakat hanya akan menjadi mimpi belaka. Dengan demikian, percepatan pelaksanaan di lapangan dalam bentuk program-program praktis merupakan langkah yang tepat dalam pencapaian visi tersebut. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Riau – khususnya di perdesaan-perdesaan –

lebih disebabkan oleh kurangnya keahlian sebagian warga masyarakat dalam berbagai bidang pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat melakukan usaha mandiri atau tidak dapat diterima di pasar kerja. Akhirnya mereka menekuni pekerjaan seperti yang telah diwariskan oleh orang tua mereka yang hasilnya maksimal hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Visi Riau 2020 ingin menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan budaya Melayu di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020. Sejalan dengan visi tersebut, dalam upaya mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu, maka Pemerintah Provinsi Riau menggali kembali serta mengembangkan berbagai macam bentuk

warisan budaya tradisional – seperti kesenian, arsitektur, kerajinan tradisional, makanan khas tempatan, dan sebagainya – yang selama ini kurang atau bahkan tidak mendapat perhatian, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pihak Pemerintah Provinsi Riau mulai memikirkan apa saja bentuk kerajinan tradisional yang dapat dikembangkan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai kerajinan khas Riau atau cenderamata khas Riau. Kain songket yang sejak lama diproduksi dan dipertahankan oleh kaum perempuan Melayu Bukit Batu dinilai sebagai salah satu bentuk kerajinan tradisional khas Melayu Riau yang harus dikembangkan dan dilestarikan oleh pemerintah.

Persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2000 menjadi dasar berpijak untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki daerah, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan adanya otonomi daerah, maka peluang terbuka selebar-lebarnya bagi daerah untuk mengembangkan berbagai sumber daya yang terdapat di daerah.

Desa Bukit Batu merupakan kawasan yang melestarikan dan mengembangkan kerajinan tradisional, khususnya tenun. Usaha tenun dilakukan oleh kaum perempuan di dalam rumah atau dapat disebut dengan usaha rumahan (*home industry*). Hal ini terjadi karena para orang tua mewariskan kemahiran tersebut kepada generasi selanjutnya secara turun temurun. Kawasan ini memang tidak terdapat tempat-tempat pelatihan yang secara khusus mengajarkan kemahiran menenun. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu kemahiran atau keahlian sebagai pengrajin songket (penenun) tersebut tetap dikuasai oleh keluarga yang sebelumnya menekuni aktivitas tersebut. Kalaupun ada pengrajin yang baru, jumlahnya tidaklah terlalu banyak.

Pewarisan kemahiran menenun dilakukan oleh masyarakat desa Bukit Batu bukan hanya bertujuan untuk melestarikan kerajinan tradisional tersebut, melainkan juga mempunyai nilai ekonomis. Pekerjaan sebagai penenun (pengrajin songket) menjadi salah satu pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan bagi keluarga. Oleh karena itu, pekerjaan ini tetap bertahan dari waktu ke waktu, meskipun telah bermunculan songket yang diproduksi di daerah lain. Pekerjaan menenun sampai saat sekarang masih

dilakukan secara tradisional dan tidak menggunakan mesin atau teknologi yang canggih. Setiap tahapan dalam proses menenun semuanya dilakukan secara manual dan tidak dibantu oleh mesin.

Dengan demikian, perlu dilakukan pembinaan agar para pelaku usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya untuk masa yang akan datang dan sekaligus dapat diwariskan secara luas kepada generasi muda. Program pembinaan ini penting dilakukan agar kerajinan tradisional khas masyarakat Melayu Riau tetap dapat bertahan pada masa yang akan datang.

Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

A. Geografis dan Demografis

Desa Bukit Batu adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bukit Batu. Desa Bukit Batu termasuk daerah pesisir, karena letaknya dekat dengan Selat Bengkalis. Desa ini merupakan desa yang usianya sudah amat tua, karena ia telah ada sejak masa zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura. Secara legenda, desa ini berasal dari nama "bukit yang berbatu-batu", yang konon katanya bukit ini keberadaannya ghaib, dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang "sesat" (kehilangan arah dan tak tahu posisi) dalam hutan. Konon menurut cerita, bukit ini memang pernah ditemukan oleh orang-orang yang sedang

sesat di hutan dan kemudian ghaib (hilang) kembali dari pandangan mata manusia. Namun, tidak ada masyarakat yang menemukannya, jika sengaja dicari.

Pada masa lalu, di desa ini sudah terdapat kantor pos dan juga sekolah khusus milik orang China. Dengan alasan inilah, kecamatan di daerah ini diberi nama Kecamatan Bukit Batu dengan Ibu Kotanya Sungai Pakning. Hubungan antara Bukit Batu dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura sangat kuat, karena di Desa ini terdapat Istana Bukit Batu yang berfungsi sebagai pusat angkatan laut dan dikomandai oleh seorang Datuk Laksamana, dan beliau inilah yang dikenal dengan nama Datuk Laksamana Raja Di Laut Bersemayam di Bukit Batu. Di daerah ini cukup banyak terdapat peninggalan situs sejarah – yang sekarang juga dipelihara dan dipugar oleh Pemerintah – seperti makam raja-raja, masjid, meriam, istana, kelenteng, dan lain-lain. Sebagian benda sejarah ada yang dibawa ke Kerajaan Siak, ada yang disimpan di museum dan ada juga yang dijual oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Letak Desa Bukit Batu sebenarnya cukup strategis, yaitu terletak di jalan negara lintas Sungai Pakning – Dumai. Jarak Desa Bukit Batu dengan Ibu Kota Kabupaten (Bengkalis) ± 20 Km, yang

ditempuh melalui transportasi laut menyeberang Selat Bengkalis. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kecamatan (Sungai Pakning) \pm 27 Km, yang dapat ditempuh melalui transportasi darat. Luas Desa Bukit Batu \pm 5000 Ha. yang terdiri dari pemukiman penduduk (40 Ha), perkebunan rakyat (karet dan kelapa ; 170 Ha), perladangan (100 Ha), hutan (500 Ha), dan juga rawa (90 Ha). Adapun batas Desa Bukit Batu dengan wilayah lainnya sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukajadi
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buruk Bakul
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai

Desa Bukit Batu terdiri dari 6 RT, 3 RW, dan 3 Kepala Dusun. Ketiga dusun tersebut adalah Dusun Banyu Mas, Dusun Muara Laut dan Dusun Parit Rodi. Pertumbuhan penduduk Desa Bukit Batu tidaklah terlalu tinggi, baik dilihat dari angka kelahiran maupun jumlah pendatang. Rendahnya mobilitas penduduk di daerah ini dikarenakan tidak adanya sumber ekonomi utama yang dapat menarik pendatang dari luar. Adapun jumlah penduduk Desa Bukit Batu sebanyak 274

KK yang rinciannya dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Sumber : Kantor Desa Bukit Batu: 2013

Grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Bukit Batu jika dilihat dari sudut perbandingan jenis kelamin adalah relatif berimbang. Artinya, tidak ada dominan jenis kelamin tertentu di Desa Bukit Batu. Jumlah penduduk di Desa Bukit Batu memanglah belum terhitung padat, dan penduduk lebih banyak bermukim di daerah pinggir jalan, sementara yang tanah-tanah yang letaknya agak ke dalam masih terlihat kosong atau belum terdapat tempat tinggal.

B. Sosial Ekonomi

Mayoritas masyarakat Desa Bukit Batu bekerja sebagai petani karet. Petani karet di desa ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) petani yang memiliki kebun karet dan mengerjakannya sendiri, (2) petani penggarap (yang tidak memiliki kebun) dan menyewa dengan orang lain. Sistem penyewaan kebun karet di Desa Bukit Batu menganut sistem sewa per-

bulan. Sewanya ada yang dibayar dengan sejumlah uang, dan ada juga yang dibayar dengan jumlah kilogram karet (15 – 20 Kg/jalur). Pola ini sebenarnya cukup memberatkan masyarakat penyewa, karena pada musim hujan pun sewa kebun harus dibayar. Namun, pola ini sudah dianut oleh masyarakat sejak masa lalu, karena pola ini tidak berisiko bagi pemilik lahan – risiko cuaca ditanggung oleh penggarap – di samping juga untuk menghindari penipuan. Kebun karet yang terdapat di Desa Bukit Batu cukup banyak, hanya saja peremajaannya sampai saat sekarang relatif kurang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani karet.

Di samping kebun karet, desa ini juga cukup banyak memiliki kebun kelapa. Hanya saja pada saat sekarang ini hasil yang diperoleh dari kebun kelapa kecil sekali, karena buah kelapanya semakin kecil akibat kondisi alam. Beban hidup yang ditanggung oleh masyarakat cukup berat, karena lahan kosong tidak dapat dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, karena letak daerah yang dekat dengan laut, sehingga setiap saat air laut (air asin) dapat saja menggenangi lahan dan tentu saja berakibat matinya tanaman atau sayuran. Jadi, sayur mayur

didatangkan oleh pedagang dari daerah lain, dan masyarakat semata-mata menjadi konsumen dan bukan produsen.

Pekerjaan masyarakat yang lainnya adalah seperti PNS, pedagang, nelayan, tukang (buruh bangunan), pegawai swasta, pengrajin, dan lain sebagainya. Meskipun daerah ini berada dekat dengan laut, namun masyarakat tidak mau berprofesi sebagai nelayan, karena hasil tangkapan mereka sangat kecil. Tangkapan yang mereka peroleh kadang-kadang untuk konsumsi keluarga saja tidak mencukupi apalagi untuk dijual. Kondisi ini memang berbeda dengan tahun 1970-an – 1980-an, di mana hasil tangkapan nelayan cukup besar.

Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar menengah ke bawah. Karena pekerjaan mereka sebagai petani karet sangat bergantung dengan cuaca atau musim. Untuk menutupi kebutuhan keluarga, semua anggota keluarga dilibatkan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Di daerah ini memang tidak terlihat perbedaan gender, karena kaum perempuan terlibat aktif dalam mencari nafkah, baik sebagai petani karet ataupun pekerjaan lainnya. Khusus untuk Dusun Muara Laut, kaum perempuan cukup banyak yang bekerja sebagai pengrajin songket (tenun) dan merekalah yang menopang ekonomi rumah tangga.

C. Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, oleh sebab itu berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa, pendidikan menempati urutan pertama dan utama dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Dengan pendidikan, sumber daya manusia dapat dibangun, kecerdasan bangsa dapat ditingkatkan, dan kesejahteraan dapat direntang ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah menyediakan sarana pendidikan di Desa Bukit Batu, khususnya pendidikan tingkat dasar. Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Bukit Batu dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Sumber : Kantor Desa Bukit Batu : 2013

Dari grafik di atas terlihat dengan jelas bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Bukit Batu barulah setingkat pendidikan dasar. Jumlah pendidikan dasar (SD) sudah cukup memadai, karena sudah

mampu menampung jumlah anak-anak usia sekolah dasar. Dan SMP yang terdapat di desa ini juga mampu menampung anak-anak yang lulus dari beberapa SD dari desa sekitarnya. Sedangkan sekolah menengah atas (SLTA) terdapat di Desa Temiang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Desa Bukit Batu, atau sebagian masyarakat menyekolahkan anaknya ke Ibu Kota Kecamatan (Sungai Pakning), dan ada juga ke Ibu Kota Kabupaten (Bengkalis).

Untuk pendidikan agama, di desa ini terdapat 3 Sekolah MDA/PDTA yang terdapat pada tiap dusunnya. Sekolah MDA/PDTA ini murni swadaya masyarakat, baik dari sisi bangunan fisiknya, maupun dari sisi pembiayaan (termasuk gaji guru). Sekolah MDA/PDTA dilakukan pada siang hari setelah anak-anak pulang dari SD.

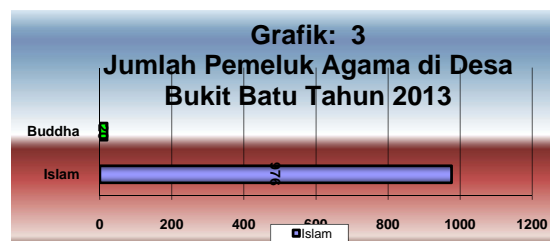
Antusias masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi, hal ini terlihat dengan jelas dari jumlah anak mereka yang melanjutkan sekolah, baik pada tingkat atas, maupun ke perguruan tinggi. Masyarakat desa ini cukup menyadari akan arti pentingnya pendidikan bagi peningkatan sumber daya manusia dan juga sekaligus untuk mendapatkan pekerjaan yang "enak". Mereka tidak menginginkan nasib anak mereka sama seperti nasib mereka sebagai petani karet,

karena pekerjaan ini hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

D. Sosial Keagamaan

Secara kehidupan keagamaan, masyarakat Desa Bukit Batu terdapat pluralitas agama. Pluralitas beragama bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Desa Bukit Batu, karena sudah sejak lama masyarakat yang tinggal di wilayah ini hidup secara berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Kemajemukan (*plural*) bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi memang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Istilah ini juga digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk menggambarkan struktur masyarakat Indonesia¹. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: *pertama*, majemuk secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Meskipun harus diakui bahwa pluralitas beragama di desa ini tidaklah *seplural* di perkotaan. Kondisi ini tentu saja sangat menguntungkan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Adapun

jumlah penganut agama di Desa Bukit Batu dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber : Kantor Desa Bukit Batu: 2013

Dari grafik di atas terlihat dengan jelas bahwa mayoritas masyarakat Desa Bukit Batu menganut agama Islam (98%), sedangkan yang menganut agama Buddha hanya 2%. Kondisi ini terjadi karena mayoritas masyarakat terdiri dari etnis Melayu dan Jawa, sedangkan penganut Buddha berasal dari etnis China.

Di Desa Bukit Batu terdapat tiga rumah ibadah untuk penganut agama Islam (masjid) yang masing-masing satu untuk setiap dusunnya. Rumah ibadah ini juga difungsikan sebagai tempat pengajian, dan pada waktu lalu juga difungsikan sebagai tempat belajar ilmu-ilmu agama sebelum ada gedung khusus. Sementara itu bagi penganut agama Buddha, mereka menjalan ibadah di Kelenteng yang terdapat di Desa Sukajadi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kelenteng ini merupakan Kelenteng tua, yang tidak jarang untuk di Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai pusat kegiatan hari-hari besar.

Konsep Pembinaan

Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan dengan berbagai pendekatan, salah satu di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat. Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.²

Konsep pembangunan masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua teknik, yaitu: (1) partisipasi masyarakat, (2) pengorganisasian masyarakat. Kedua teknik pembangunan ini merupakan proses pemberdayaan yang berarti pembangunan harus bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat. Konsep pembangunan juga dapat dipahami sebagai program dan gerakan sosial. Sebagai program, pembangunan masyarakat merupakan

bagian integral dari pembangunan nasional dengan titik berat pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan pembangunan masyarakat sebagai gerakan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan suatu ideologi³.

Dewasa ini telah disadari bahwa pendekatan pembangunan menurut pola dari atas ke bawah (*top down*) telah kehilangan kepercayaan, maka sebagai reaksi muncul pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) atau pendekatan dari akar rumput (*grass root*).⁴ Penekanan tersebut adalah partisipasi masyarakat sasaran, meskipun diakui Soedjatmoko bahwa pendekatan seperti ini bukan merupakan suatu obat mujarab.⁵ Untuk itu partisipasi tanpa belajar dapat merupakan latihan yang tak berguna, karena pihak-pihak yang terlibat bisa jadi justru kecewa karena tidak memperoleh kesuksesan atau tidak merasakan hasil dari pembangunan itu.

Coombs dan Ahmed⁶ menyebutkan bahwa kebutuhan pendidikan untuk pembangunan pedesaan dibagi dalam empat kelompok, yaitu: (1) pendidikan umum dan dasar, (2) pendidikan kesejahteraan keluarga, (3) pendidikan kemasyarakatan, dan (4) pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan salah satu dari jenis Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang mempersiapkan warga

belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu⁷.

Masalah pokok dari keterbelakangan bukanlah kurangnya bahan baku, melainkan ketidakmampuan penduduk desa untuk mengatasi keterbelakangan mereka dan menghilangkan rintangan-rintangan budaya, seperti sikap-sikap tradisional, pasrah kepada nasib, ketergantungan, baik secara individual maupun kolektif. Fenomena ini harus dibuka oleh kondisi-kondisi eksternal yang melingkupinya⁸. Pembangunan masyarakat merupakan perpaduan antara pengorganisasian masyarakat dengan pembangunan ekonomi⁹. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menanamkan perasaan solidaritas di antara mereka dan jiwa pembangunan. Sedangkan pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan peningkatan produksi melalui pembelajaran *life-skills* baru atau memadukan dengan yang dimilikinya, merangsang pemasaran hasil produksi, mendorong penciptaan modal, dan mengembangkan sikap menghargai kerja.

Proses pengorganisasian dan pengembangan ekonomi dapat dilakukan melalui program pendidikan luar sekolah yang secara umum bertujuan: (1) melayani

warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, (2) membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.¹⁰

Mubyarto, seperti yang dikutip oleh M. Yahya Mansur¹¹, menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat perdesaan di Indonesia didasarkan pada tipologi mata pencaharian penduduknya. Alasannya ialah: (1) mata pencaharian adalah realita yang ada di pedesaan, (2) tidak asing bagi para penduduk dalam arti digeluti dan ditekuni dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi milik penduduk desa dan bersifat *indigenous*, (3) pengembangannya dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan sehingga geraknya dimulai dari bawah, dan menumbuhkan *home industry* di pedesaan, dan (4) bisa menumbuhkan koperasi yang tepat guna.

Dalam kaitan dengan karakteristik pengembangan masyarakat, Glen¹² menggambarkan bahwa ada tiga unsur

dasar yang menjadi ciri khas pendekatan ini:

1. Tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Terkait dengan unsur yang pertama ini, tujuan utama dari pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian, dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis 'ketetanggaan', meskipun bukan secara eksklusif.
2. Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. Terkait dengan elemen kedua ini, dipersyaratkan adanya kerjasama dan kreativitas sebagai dasar proses pengembangan masyarakat yang baik. Pandangan yang melihat komunitas sebagai kelompok masyarakat – yang secara potensial – kreatif dan kooperatif merefleksikan idealisme sosial yang positif terhadap upaya-upaya kolaboratif dan pembentukan identitas komunitas.
3. Menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif. Elemen ketiga ini menggambarkan bahwa peran *community worker* pada pendekatan ini

lebih banyak difokuskan pada peran sebagai 'pemercepat perubahan' (*enabler*), 'pembangkit semangat' (*encourager*), dan 'pendidik' (*educator*). Pendekatan ini lebih tepat digunakan dibandingkan dengan pendekatan direktif, karena masyarakat lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan apa yang mereka pilih, daripada apa yang telah diyakinkan oleh *community worker* untuk seharusnya mereka lakukan.

Pemberdayaan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses perubahan dalam bentuk pembelajaran keterampilan (*life-skills*) berbasis sosial budaya. Melalui model ini akan diberikan penyadaran akan eksistensi diri perempuan, sehingga aktivitas produktif perempuan dapat berlangsung secara swadaya. Pemberdayaan berbasis sosial budaya adalah proses memampukan dan memandirikan masyarakat yang didasarkan pada unsur-unsur budaya yang ada pada masyarakat. Pemberdayaan orang dewasa melalui pendidikan sangat terkait dengan pengembangan budaya, karena orang dewasa harus diakui eksistensinya bahwa secara sosial telah memiliki kematangan, sehingga pendidikan bagi mereka harus bersifat liberal¹³. Basis sosial budaya juga

mencakup dasar keterampilan, bahan baku keterampilan, peralatan/media pembelajaran dan produksi, serta sumber belajar yang memanfaatkan potensi lokal. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di sini mengambil bentuk intervensi mikro, yaitu intervensi sosial yang dikembangkan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di level (tingkat) individu, keluarga dan kelompok. Intervensi mikro lebih memusatkan pada dua metode utama, yaitu metode bimbingan sosial perseorangan dan bimbingan sosial kelompok.¹⁴

Pelaksanaan Pembinaan

A. Rekrutmen

❖ Rekrutmen peserta didik

Peserta didik yang akan direkrut sebagai peserta pelatihan dalam pelatihan usaha tenun khas Melayu Riau adalah sebanyak 20 orang yang kesemuanya adalah perempuan. Adapun kriteria peserta yang akan direkrut adalah: (1) tidak memiliki pekerjaan tetap, (2) berasal dari keluarga miskin, (3) Usia 20 – 45 tahun, (4) memiliki minat untuk menekuni pekerjaan sebagai penenun, dan (5) sudah memiliki sedikit pengetahuan tentang tenun. Proses rekrutmen peserta didik berjalan

dengan baik dan tidak menemukan kendala di lapangan.

❖ Rekrutmen tenaga pendidik

Tenaga pendidik yang diperlukan dalam proses pembelajaran menenun adalah satu orang dan berjenis kelamin perempuan. Adapun kriteria tenaga pendidik yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah: (1) memiliki kompetensi dalam bidang keterampilan menenun, (2) memiliki kemampuan untuk mendidik orang dewasa, dan (3) memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Proses rekrutmen tenaga pendidik berjalan dengan baik dan tidak menemukan kendala di lapangan. Tenaga pendidik berasal dari komunitas lokal yang cukup dikenal keahliannya dalam bidang menenun, karena beliau juga sering mendapatkan pelatihan dari Dinas Perindustrian, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

B. Bentuk Kegiatan

Program Pelatihan Usaha Tenun merupakan program pemberdayaan melalui pendidikan luar sekolah. Konsep pemberdayaan model ini memandang memandang bahwa pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya

dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan warga belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat¹⁵.

Kindervatter¹⁶ menyebutkan ada delapan karakteristik pendidikan luar sekolah sebagai proses pemberdayaan, yaitu: (1) belajar dilakukan dalam kelompok kecil, (2) pemberian tanggung jawab lebih besar kepada warga belajar selama kegiatan pembelajaran berlangsung, (3) kepemimpinan kelompok diperankan oleh warga belajar, (4) sumber belajar bertindak sebagai fasilitator, (5) proses kegiatan belajar berlangsung secara demokratis, (6) adanya kesatuan pandangan dan langkah dalam mencapai tujuan, (7) menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pada warga belajar, dan (8) bertujuan akhir untuk meningkatkan status sosial, ekonomi atau politik warga belajar dalam masyarakat.

Pendidikan luar sekolah berdasarkan *empowering process* menekankan kepada pendekatan pendidikan yang memperluas pengalaman bagi warga belajar untuk memperoleh

pemahaman dan mengontrol semua aspek proses belajar mengajar, belajar tentang materi dan proses keterampilan yang berkaitan dengan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan warga belajar, dengan mengutamakan kerjasama untuk memecahkan masalah bersama. Dalam aplikasinya, pendidikan luar sekolah dengan pendekatan *empowering process*, dimulai dengan pembentukan kelompok belajar bagi warga belajar dan ketersediaan fasilitator. Fasilitator mengembangkan kepemimpinan partisipatif dan secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar kepada kelompok.

C. Tempat dan Media Pembelajaran

Adapun tempat pelatihan menenun dilakukan di gedung PKK Desa Bukit Batu. Sedangkan media pembelajaran yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan menenun adalah sebagai berikut:

- ✚ Rumah tenun
- ✚ Benang
- ✚ Benang mas
- ✚ Terau
- ✚ Karap
- ✚ Sisir
- ✚ Torak
- ✚ Gunting
- ✚ Peleting
- ✚ Lidi kelapa

D. Waktu Pelatihan

Kegiatan pelatihan menenun dilakukan selama 4 minggu (24 hari kerja). Kegiatan pelatihan dilakukan dari hari Senin – Jumat mulai dari jam 14.00 – 17.45.

E. Proses Pembelajaran

Untuk mencapai target dan tujuan program pelatihan usaha tenun, maka kegiatan pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

1. Proses penyadaran

Gagasan tentang peningkatan kesadaran merupakan bagian inti dalam pengembangan masyarakat, dan merupakan bagian proses yang terpenting¹⁷. Proses penyadaran dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan warga belajar. Kegiatan ini berupaya membuka mata dan pikiran warga belajar tentang kondisi yang mereka alami serta berbagai peluang yang mungkin mereka raih. Proses penyadaran ini membuat warga belajar memahami berbagai kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki dan secara perlahan diisi dengan menumbuhkan semangat untuk berubah. Berbagai pemahaman tradisional yang mungkin membelenggu mereka diretas secara perlahan sehingga mereka dapat tercerahkan. Proses ini menjadi amat

penting agar kegiatan pelatihan keterampilan yang akan mereka terima tidak menjadi sia-sia.

Program ini meliputi materi yang dapat menimbulkan kesadaran dan tumbuhnya motivasi pada diri pengrajin yang meliputi; pentingnya bekerja keras; memenej waktu; menambah pengetahuan yang terkait dengan bidang usaha yang ditekuni; dan nilai ekonomis yang dapat dari usaha yang mereka tekuni.

2. Kegiatan pelatihan

Kegiatan pelatihan dimulai dari pengenalan berbagai media (sarana) yang digunakan dalam kegiatan menenun, cara menggunakan serta fungsinya. Di samping itu juga diperkenalkan tentang berbagai motif baru tenunan dan cara mengerjakannya. Proses pembelajaran teoretis hanya dilakukan dalam satu hari kegiatan dan selanjutnya adalah praktik. Kegiatan praktik dimulai dari tahapan awal, yaitu mulai dari menggulung benang (menerau/mengelos), menghani, membentang, dan terakhir menenun. Setiap warga belajar secara bergantian melakukan setiap tahapan kegiatan tersebut sesuai dengan media yang tersedia. Hal ini dilakukan agar setiap warga belajar mempunyai pengalaman belajar dan akhirnya dapat menerapkannya sendiri

setelah kegiatan pelatihan selesai. Sampai akhir kegiatan pelatihan selesai, warga belajar dapat menghasilkan tiga helai kain tenun dengan motif yang berbeda.

Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan generasi baru dalam bidang usaha tenun agar kerajinan tradisional masyarakat Melayu Riau ini tetap dapat bertahan pada masa yang akan datang. Di samping itu, melalui kegiatan ini diharapkan kualitas kain tenun yang mereka hasilnya meningkat sehingga dapat bersaing di pasaran. Dampak yang lebih jauh tentu saja kegiatan ini dapat mempunyai nilai ekonomis, sehingga terjadi perubahan kondisi ekonomi mereka.

Kesimpulan

Program kegiatan pelatihan yang bersifat kecakapan hidup (*life skill*) ini dipandang sebagai program yang penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, dan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program pelatihan usaha tenun merupakan suatu upaya untuk melestarikan kerajinan tradisional khas Melayu Riau yang tidak begitu banyak pelakunya. Oleh karena itu, program ini amat penting dalam upaya mewujudkan Visi Riau 2020 yang ingin menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu pada tahun 2020.

Catatan:

¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 27-40.

² Ginanjar Kartasasmita, *Kemiskinan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 74.

³ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1.

⁴ M. Soedomo, *Pendidikan Luar Sekolah ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat* (Jakarta: P2LPTK-Depdikbud, 1989), hlm. 31.

⁵ Soedjatmoko, "Pembangunan Sebagai Proses Belajar", dalam *Basis*, Edisi XXXIV-9 (Yogyakarta: Yayasan BP-Bazis, 1985), hlm. 32.

⁶ P.H. Coombs dan M. Ahmed, *Memerangi Kemiskinan di Dunia Ketiga Melalui Pendidikan Non-Formal* (terjemahan) (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 21.

⁷ PP No. 73 Tahun 1991 Pasal 3 ayat 6.

⁸ P.H. Coombs dan M. Ahmed, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁹ Sudjana, *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah & Teori Pendukung Asas* (Bandung: Falah Production, 2000), hlm. 132.

¹⁰ PP No. 73 Tahun 1991 Pasal 2.

¹¹ M. Yahya Mansur, "Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan", dalam Rr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, Abd. Basyid (eds.), *Model-model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm 411.

¹² Andrew Glen, "Methods and Themes in Community Practice", in H. Butcher, et.al (eds.), *Community and Public Policy* (London: Pluto, 1993), hlm. 22-40.

¹³ D. Jones, *Adult Education and Cultural Development* (London: Routledge, 1988), hlm. 144.

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: FEUI, 2003), hlm. 55-58.

¹⁵ Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 77.

¹⁶ S. Kiindervatter, *Nonformal Education as an Empowering Process* (Masschusetts: Center for International Education University of Masschusetts, 1979), hlm. 153.

¹⁷ Jim Ife & Frank Tesoriero, *Community Development* (terjemahan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 345.